



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA OPD)**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2016 - 2021**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016- 2021.

Perubahan renstra ini disusun dalam rangka sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai periode 2016-2021 dan juga sekaligus perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai dalam memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja perangkat daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Kami mengharapkan kiranya kegiatan – kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kemudahan dan kekuatan serta keberhasilan kepada kita dalam melaksanakan segala rencana yang kita susun bersama ini, Aamiin.

Sei Rampah,

2019

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Dinas,

H. IKHSAN, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750511 199311 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika.....	27
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	36
BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kominfo.....	42
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	46
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kominfo	46
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	48
BAB IV Tujuan dan Sasaran	50
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo	50
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	52
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika	52
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	59
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif	59
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	67
7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	67
BAB VIII Penutup.....	69
8.1 Pedoman Transisi	69
8.2 Kaidah Pelaksanaan.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menjadi dasar terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai yang mana sebelumnya masih Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Kabupaten Serdang Bedagai dalam menjalankan urusan Komunikasi dan Informatika. Terbitnya Peraturan Daerah ini berdampak pada perubahan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai yang dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan yang semakin luas. Perubahan ini tentunya berdampak juga pada perencanaan lima tahunan yaitu renstra yang semula Bagian menjadi Dinas, atas dasar tersebut maka perlu dilakukan perubahan atas Rencana Strategis Dinas Komunika dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021

Selain dengan terbitnya Perda tersebut dan dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjadi salah satu dasar perlunya dilakukan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai sehingga indikator kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan yang ada. Sesuai Pasal 13 ayat (1) Permendagri 86 Tahun 2017 pengertian Renstra Perangkat Daerah yaitu memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yaitu Renstra ini mempunyai fungsi sebagai acuan, pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perubahan RPJMD 2016-2021 dilakukan karena adanya perubahan beberapa kebijakan nasional sehingga dilakukan

pengendalian dan evaluasi dimana hasilnya bahwa RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2016-2021 harus dilakukan perubahan. Dengan perubahan RPJMD, sesuai Pasal 342 ayat (4) Permendagri 86 Tahun 2017 Perangkat Daerah melakukan Perubahan Renstra PD dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD tersebut. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai Pasal 359 Permendagri 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa tahapan penyusunan renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 s.d 124 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan tahapan (a) persiapan penyusunan, (b) penyusunan rancangan awal, (c) penyusunan rancangan, (d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, (e) perumusan rancangan akhir, dan (f) penetapan.

Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai menjadi dasar perubahan, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang kemudian menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan selama lima tahun, dengan demikian perubahan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai 2016-2021 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Governmet;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013–2033;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
22. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
23. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 384/18.27/Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 dan Penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 adalah:

1. Penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi untuk mencapai Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Penyesuaian indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
3. Menyediakan Dokumen Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.

4. Sebagai tolok ukur keberhasilan atas Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai adalah:

1. Menjadi acuan resmi bagi seluruh Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun;
2. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai setiap tahun.
3. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai target pencapaian RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021.
4. Menyelaraskan antara Rencana Kinerja Tahunan dengan Visi dan Misi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serdang Bedagai dan dokumen perencanaan lainnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB VIII PENUTUP

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Serdang Bedagai dengan tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan di bidang Komunikasi dan Informatika serta kehumasan berkomitmen untuk melakukan perubahan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik serta tata kelola pemerintahan berbasis e-government yang unggul, inovatif dan berkelanjutan.

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, sebagai pimpinan organisasi;
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
 - a. Seksi Pemberitaan dan Kemitraan Media;
 - b. Seksi Dokumentasi dan Publikasi;
 - c. Seksi Kehumasan, Layanan Informasi dan Komunikasi Publik.

4. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, membawahi
 - a) Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi;
 - c) Seksi Layanan E-Government.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kominfo Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas membantu Bupati Serdang Bedagai melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan Tugas Pembantuan yang di tugaskan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi dalam hal pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta kehumasan dan layanan informasi publik;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan e-government dalam hal infrastruktur dan teknologi, pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi serta layanan e-government.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam bidang pengelolaan informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan e-government.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang Komunikasi dan informatika yang diberikan oleh Bupati Serdang Bedagai.

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Tugas Pokok :

Memimpin pelaksanaan tugas dalam menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang komunikasi dan informatika dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten serta mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, evaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangannya.

Fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja dan penanggung jawab pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika.
- 2) Penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan dan laporan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informatika.
- 3) Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pengelolaan informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan e-Government yang meliputi bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik dan layanan kehumasan, layanan infrastruktur dasar data centre, disaster recovery centre dan TIK pemerintah, layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Provinsi dan layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifikasi dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City serta penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan Masyarakat serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten.
- 4) Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan e-Government yang meliputi bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung

kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik dan layanan kehumasan, layanan infrastruktur dasar data centre, disaster recovery centre dan TIK pemerintah, layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Provinsi dan layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifikasi dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City serta penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan Masyarakat serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten.

- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan e-Government yang meliputi bidang yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik dan layanan kehumasan, layanan infrastruktur dasar data centre, disaster recovery centre dan TIK pemerintah, layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Provinsi dan layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifikasi dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City serta penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan Masyarakat serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten.



- 6) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 7) Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten.
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.

b. Uraian Tugas :

- 1) Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
- 2) Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- 4) Menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan serta laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan daerah, peraturan perundangundangan dan hasil evaluasi sebelumnya sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- 5) Merumuskan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan e-Government yang meliputi bidang yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik dan layanan kehumasan, layanan infrastruktur dasar data centre, disaster recovery centre dan TIK pemerintah, layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Provinsi dan layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifikasi dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City serta penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan Masyarakat serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten;

- 6) Melaksanakan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan e-Governmnet yang meliputi bidang yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik dan layanan kehumasan, layanan infrastruktur dasar data centre, disaster recovery centre dan TIK pemerintah, layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Provinsi dan layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifikasi dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City serta penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan Masyarakat serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten;
- 7) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang bidang pengelolaan informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan e-Governmnet yang meliputi bidang yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik dan layanan kehumasan, layanan infrastruktur dasar data centre, disaster recovery centre dan TIK pemerintah, layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Provinsi dan layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifikasi dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City serta penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah,



- pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan Masyarakat serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten;
- 8) Melaksanakan pembinaan teknis dan kerjasama dengan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sesuai dengan norma, prosedur dan kewenangan yang ditetapkan;
 - 9) Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait baik tingkat pusat, propinsi dan daerah sesuai dengan sesuai dengan norma, prosedur dan kewenangan yang ditetapkan;
 - 10) Menyusun Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan sebagai pembiayaan oprasional kegiatan serta pertanggungjawaban;
 - 11) Menyusun Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas sebagai pertanggungjawaban kinerja aparatur sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi;
 - 12) Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan bahan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati sesuai tugas dan fungsinya;
 - 13) Melaporkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - 14) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
 - 15) Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan SKP;
 - 16) Melaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - 17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Tugas Pokok :

Memimpin pelaksanaan tugas sekretariat dalam menyusun program dan melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, ketatausahaan dan ketatalaksanaan, administrasi umum, kearsipan, perlengkapan, administrasi kepegawaian internal, pengolahan data dan informasi kepegawaian dan membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas badan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja kesekretariatan
- 2) Pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, urusan rumah tangga dan ketatausahaan.
- 3) Pengelolaan urusan sistem informasi dan database kepegawaian, pengolahan data dan informasi kepegawaian, kearsipan dan dokumentasi
- 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian internal dan pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan.
- 5) Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas-tugas bidang
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Uraian Tugas :

- 1) Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
- 2) mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- 4) Menyusun rencana kegiatan operasional berdasarkan program kerja serta hasil evaluasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- 5) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 6) Mengkoordinasikan, mengumpulkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai visi dan misi organisasi;
- 7) Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan bahan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati sesuai tugas dan fungsinya;
- 8) Melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai rencana strategis, kondisi dan hasil kerja sebagai pedoman, tolak ukur dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 9) Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan, administrasi umum, surat-menyurat, kearsipan, dan perlengkapan.;
- 10) Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan yang terdiri dari analisa kebutuhan, penyusunan anggaran, pembukuan, verifikasi dan administrasi keuangan lainnya, serta pelaporan dan pertanggung jawaban;
- 11) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian internal;
- 12) Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas bidang
- 13) Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan urusan kepegawaian, keuangan, administrasi surat menyurat, perlengkapan dan kearsipan;
- 14) Melaporkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 15) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa sesuai kewenangan;
- 16) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam pengambilan keputusan;
- 17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam bidang informasi dan komunikasi publik meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dalam hal pemberitaan, dokumentasi dan publikasi, menjalin kemitraan dengan media, pelayanan kehumasan, informasi dan komunikasi publik.

Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dalam hal pemberitaan, dokumentasi dan publikasi, menjalin kemitraan dengan media, pelayanan kehumasan, informasi dan komunikasi publik;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dalam hal pemberitaan, dokumentasi dan publikasi, menjalin kemitraan dengan media, pelayanan kehumasan, informasi dan komunikasi publik;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi penguatan kapasitas sumber daya

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dalam hal pemberitaan, dokumentasi dan publikasi, menjalin kemitraan dengan media, pelayanan kehumasan, informasi dan komunikasi publik;

- 4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dalam hal pemberitaan, dokumentasi dan publikasi, menjalin kemitraan dengan media, pelayanan kehumasan, informasi dan komunikasi publik;
- 5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dalam hal pemberitaan, dokumentasi dan publikasi, menjalin kemitraan dengan media, pelayanan kehumasan, informasi dan komunikasi publik;
- 6) Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi pelaporan pengelolaan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 7) Pengaturan tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- 8) Peningkatan SDM Komunikasi dan Informatika bidang Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 9) Perencanaan dan menyiapkan rencana strategi serta LAKIP Bidang Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 10) Pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;



- 11) Penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
- 12) Pelaksanaan penilaian dan eavaluasi tugas bawahan sebagai bahan dalam pembuatan SKP.

b. Uraian Tugas :

- 1) Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
- 2) Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan pengembangan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dalam hal pemberitaan, dokumentasi dan publikasi, menjalin kemitraan dengan media, pelayanan kehumasan, informasi dan komunikasi publik;
- 5) Mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi pelaporan pengelolaan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 6) Menyiapkan rencana strategi serta LAKIP Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 7) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- 8) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
- 9) Melakukan penilaian dan eavaluasi tugas bawahan sebagai bahan dalam pembuatan SKP;
- 10) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam bidang penyelenggaraan e-Government meliputi layanan infrastruktur dasar data centre, disaster recovery centre dan TIK Pemerintah, layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan masyarakat serta layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten.

Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data centre, disaster recovery centre dan TIK Pemerintah, layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan masyarakat serta layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten.
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data centre, disaster recovery centre dan TIK Pemerintah, layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang

terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan masyarakat serta layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten.

- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data centre, disaster recovery centre dan TIK Pemerintah, layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan masyarakat serta layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten.
- 4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di layanan infrastruktur dasar data centre, disaster recovery centre dan TIK Pemerintah, layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan masyarakat serta layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten.
- 5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data centre, disaster recovery centre dan TIK Pemerintah, layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan masyarakat serta layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten.

- 6) Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi pelaporan Bidang Penyelenggaraan e-Government.
- 7) Pengaturan tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
- 8) Peningkatan SDM Komunikasi dan Informatika Bidang Penyelenggaraan e-Government.
- 9) Perencanaan dan menyiapkan rencana strategi serta LAKIP Bidang Penyelenggaraan e-Government.
- 10) Pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan.
- 11) Penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku .
- 12) Pelaksanaan penilaian dan eavaluasi tugas bawahan sebagai bahan dalam pembuatan SKP.

b. Uraian Tugas :

- 1) Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
- 2) Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan pengembangan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data centre, disaster recovery centre dan TIK Pemerintah, layanan akses internet dan

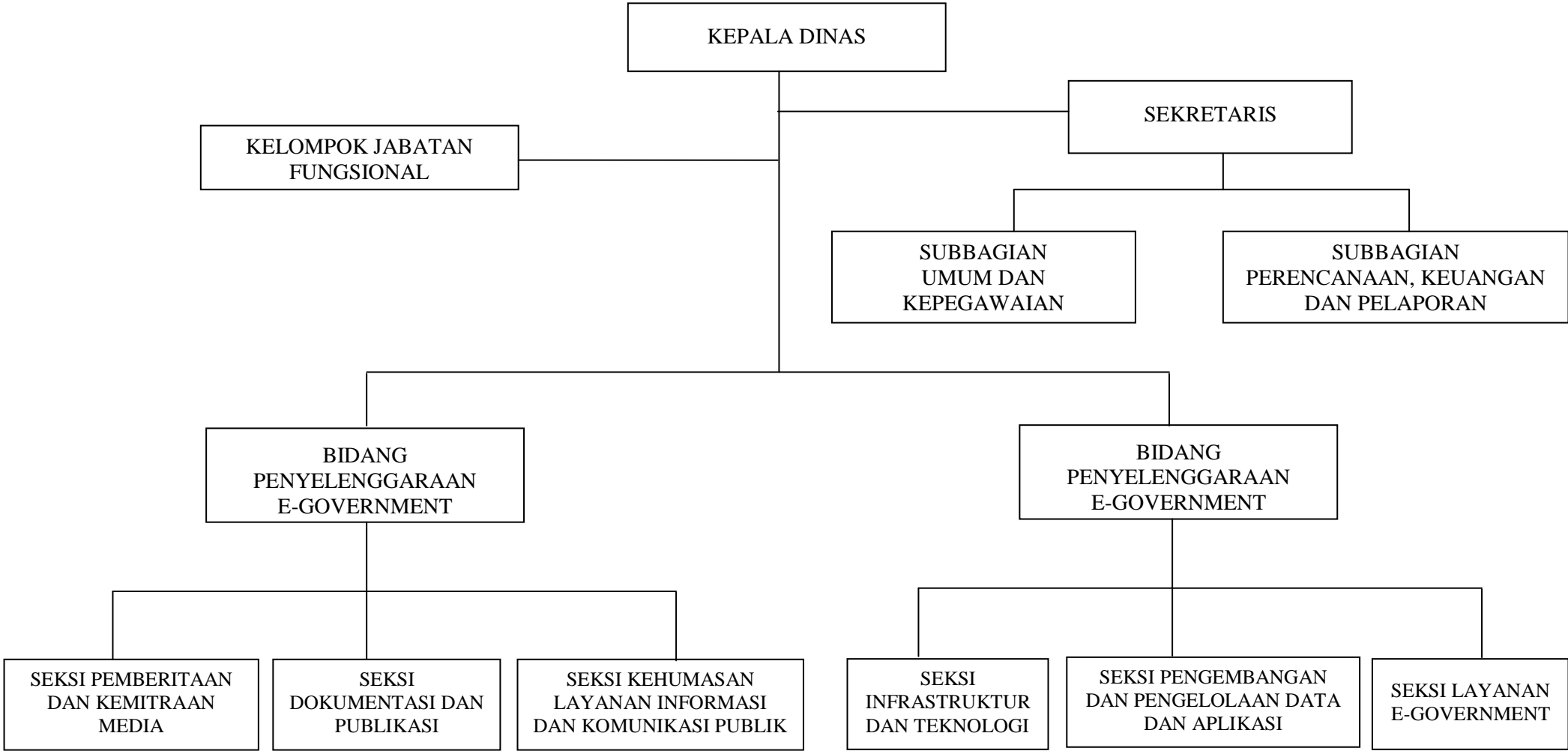
intranet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi dan masyarakat serta layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten;

- 5) Mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi pelaporan Bidang Penyelenggaraan eGovernment;
- 6) Menyiapkan rencana strategi serta LAKIP Bidang Penyelenggaraan eGovernment;
- 7) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
- 8) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
- 9) Melakukan penilaian dan evaluasi tugas bawahan sebagai bahan dalam pembuatan SKP;
- 10) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.2. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Serdang Bedagai

LAMPIRAN PERBUP BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 38 TAHUN 2016
TANGGAL: 15 Desember 2016



2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 30 pegawai, dengan rincian PNS sebanyak 18 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 12 Orang.

Rincian Jumlah pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Jumlah Tenaga Kontrak dapat di lihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1				1
2.	Sekretariat		1	2	3	6
3.	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		1	3	2	6
4.	Bidang Penyelenggaraan E-Government		1	3	1	5
						18

Tabel 2.2. Jumlah Tenaga Kontrak

No	Uraian	Jumlah
1.	Dinas Kominfo	8
2.	Radio Sergai FM	5
		13

Berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui bahwa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai terdapat 22,22% pegawai PNS yang memiliki gelar Strata-2, 66,67% PNS yang memiliki gelar Strata-1, 11,11% pegawai PNS yang tamat SLTA.

Adapun rincian pegawai dengan tingkat pendidikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	S2	S1	D III	SLTA	Jumlah
1.	Kepala Dinas		1			1
2.	Sekretariat		4		1	5
3.	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4	2			6
4.	Bidang Penyelenggaraan E-Government		5		1	6
						18



2.2.2. Aset

Aset yang di miliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan / Pembelian	No.Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Harga Beli/ Perolehan	Keadaan Barang			Keterangan Mutasi dll.
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota/Kijang LSX 1,8			Besi	2004	02.03.01.02.03	1 Unit			KB		Bagian Umum
2	Tangga Besi	Lokal/Tangga Lipat			Stainless	2014	02.03.01.05.01	1 Unit		B			Bagian Umum
3	Air Conditioning	Panasonic			Besi/Plastik	2008	02.04.03.08.24	1 Unit				RB	Exs Korpri
4	Filing Besi/Metal	Yunika			Besi	2013	02.06.01.04.04	1 Unit				RB	Exs Korpri
5	Lemari Kayu	Tempahan			Besi/Plastik	2013	02.06.01.04.14	1 Unit		B			Exs Korpri
6	Rak Buku	Rak Buku Kaca TACK 200			Kayu + Kaca	2009	02.06.01.04.17	1 Unit		B			Bagian Umum
7	Filing Cabinet	Filing Cabinet				2005	02.06.01.04.19	1 Unit				RB	Bagian Umum
8	Lemari Kayu	Lemari Duduk (KSA), 3 Pintu Graper			Kayu	2009	02.06.02.01.01	1 Unit		B			Bagian Umum
9	Lemari Kayu	Lemari kayu tempahan			Kayu	2010	02.06.02.01.01	1 Unit		B			Bagian Umum
10	Lemari Kayu	Lemari Gantung Minimalis			Kayu + tripleks lapis HPL	2014	02.06.02.01.01	1 Unit		B			Bagian Umum
11	Meja Kayu / Rotan	Meja Kerja /Tempahan			Kayu	2012	02.06.02.01.04	2 Unit		B			Bagian Umum
12	Kursi Besi/ Metal	Kursi Tunggu			Stainless	2015	02.06.02.01.05	1 Unit		B			Bagian Umum
13	Kursi Rapat	Kursi Tunggu			Sistem Tumpukan Pipa Kotak 20x20 mm	2011	02.06.02.01.27	15 Unit		B			Bagian Umum
14	Kursi Rapat	Bahan rangka chrome stainless			Besi + busa	2013	02.06.02.01.27	2 Unit		B			Bagian Umum
15	Kursi putar	Topix / kursi kerja				2010	02.06.02.01.30	4 Unit		B			Bagian Umum
16	Kursi putar	Kursi Kerja			Busa +Besi	2010	02.06.02.01.30	1 Unit		B			Bagian Umum
17	Meja komputer	Prodesign			Fiber	2014	02.06.02.01.37	1 Unit		B			Exs Korpri
18	Meja komputer	Prodesign			Kayu	2008	02.06.02.01.37	2 Unit			KB		Exs Korpri
19	Meja Biro	Orbitrend			Kayu	2013	02.06.02.01.48	1 Unit				RB	Exs Korpri
20	Meja Biro	Orbitrend			Kayu	2008	02.06.02.01.48	1 Unit		B			Exs Korpri

21	Meja Biro	Lokal		Kayu	2016	02.06.02.01.48	4 Unit		B			Bagian Umum
22	Meja Biro	Lokal/ Meja 1/2 Biro		Kayu	2016	02.06.02.01.48	1 Unit				RB	Exs Korpri
23	Sofa	Sofa		Kain + Busa	2015	02.06.02.01.49	1 Unit		B			Bagian Umum
24	Kursi Kerja	Lokal		Kain + Busa, Besi + busa	2016	02.06.02.01.66	1 Unit		B			Bagian Umum
25	Gordyn	Tempahan		Kain	2016	02.06.02.01.67	20 Nako				RB	Bagian Umum
26	Lemari Es	LG / Model GN-V191R		Besi	2013	02.06.02.04.01	1 Unit		B			Bagian Umum
27	AC Unit	LG		Besi/ Plastik	2014	02.06.02.04.03	1 Unit		B			Bagian Umum
28	AC Unit	Changhong		Elektronik	2009	02.06.02.04.03	1 Unit			KB		Bagian Umum
29	AC Unit	Mitsubishi / AC unit		Elektronik	2010	02.06.02.04.03	2 Unit		B			Bagian Umum
30	AC Unit	Panasonic / AC 2 PK		Elektronik	2011	02.06.02.04.03	1 Unit		B			Bagian Umum
31	AC Unit	Panasonic / Model PC 18*		Fiber	2013	02.06.02.04.03	1 Unit		B			Bagian Umum
32	Exhaust Fan	Lokal/ exhaust fan Kompor Gas		Besi	2016	02.06.02.04.07	1 Unit		B			Bagian Umum
33	Televisi	Sanyo/ Televisi		Besi	2010	02.06.02.06.03	1 Unit		B			Bagian Umum
34	Camera Video	Kamera Digital/ Nikon D300S		Elektronik	2011	02.06.02.06.21	1 Unit		B			Bagian Umum
35	Camera Video	Sony/ Camera Video HVR - HD 1000P		Elektronik	2012	02.06.02.06.21	1 Unit		B			Bagian Umum
36	Camera Video	Blitz Kamera			2013	02.06.02.06.21	1 Unit		B			Bagian Umum
37	Camera Film	Lokal / Kamera Digital		Elektronik	2016	02.06.02.06.22	1 Unit		B			Bagian Umum
38	Dispenser	Sanken/ Bottom Galon Botle		Fiber	2013	02.06.02.06.39	1 Unit		B			Bagian Umum
39	Handycam	Camera Digital		Elektronik	2008	02.06.02.06.49	1 Unit			KB		Bagian Umum
40	Handycam	Handycam		Elektronik	2014	02.06.02.06.49	1 Unit		B			Bagian Umum

41	P.C Unit / Komputer PC	Acer/ Intel Core 2 Duo Prosesor E2220			Elektronik	2009	02.06.03.02.01	1 Unit				RB	Bagian Umum
42	P.C Unit / Komputer PC	Acer			Elektronik	2012	02.06.03.02.01	1 Unit		B			Bagian Umum
43	P.C Unit / Komputer PC	Acer			Elektronik	2014	02.06.03.02.01	1 Unit		B			Bagian Umum
44	P.C Unit / Komputer PC	Acer			Elektronik	2015	02.06.03.02.01	1 Unit		B			Bagian Umum
45	Lap Top	Toshiba			Elektronik	2008	02.06.03.02.02	1 Unit				RB	Bagian Umum
46	Lap Top	Sony/ Sony Vaio			Elektronik	2011	02.06.03.02.02	1 Unit			KB		Bagian Umum
47	Lap Top	Tablet			Elektronik	2014	02.06.03.02.02	1 Unit		B			Bagian Umum
48	Lap Top	Asus / E31-XOIO			Elektronik	2016	02.06.03.02.02	1 Unit		B			Bagian Umum
49	Printer	Printer / Canon			Elektronik	2014	02.06.03.05.03	1 Unit		B			Bagian Umum
50	Printer	Printer / Epson L210			Elektronik	2015	02.06.03.05.03	1 Unit		B			Bagian Umum
51	Harddisk Eksternal	seagate/ Backup Plus Destop USB 3.0			Plat Besi Fiber	2016	02.06.03.05.14	1 Unit		B			Bagian Umum
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Meja Kerja Kepala Bagian			Kayu	2013	02.06.04.01.05	1 Unit		B			Bagian Umum
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Kursi Kerja Esselon IV			Kulit Sintetis	2015	02.06.04.01.06	1 Unit		B			Bagian Umum
54	Meja Kerja	Olympic			Kayu	2008	02.06.04.01.10	1 Unit				RB	Bagian Umum
55	Meja Rapat Pejabat lain-lain	lokal			kayu	2008	02.06.04.02.14	1 Unit		B			Exs KORPRI
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Kursi rangka Plat Besi			besi-busa	2013	02.06.04.03.05	1 Unit		B			Bagian Umum
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Rangka Crome Stainless plat Besi			Besi-Busa	2013	02.06.04.03.06	2 Unit		B			Bagian Umum
58	Tripod camera	Tripot Libect			Besi	2012	02.07.01.02.47	1 Unit		B			Bagian Umum
59	Mixer PVC	Mixer 12 chanel/ Yamaha MG 166c-USB			Elektronik	2011	02.07.01.02.77	1 Unit		B			Bagian Umum
60	Alat Komunikasi lain-lain	Pemancar Radio FM			Elektronik	2009	02.07.02.01.24	1 Unit		B			Bagian Umum

61	Alat Komunikasi lain-lain	Exciter Transistor			Elektronik	2009	02.07.02.01.24	1 Unit		B			Bagian Umum
62	Peralatan Antena VHF/FH Lain-lain	Tranmitter Exciter FM 30 Watt/ RVR Elletronica			Elektronik	2011	02.07.03.08.04	1 Unit		B			Bagian Umum
63	Peralatan Antena VHF/FH Lain-lain	Antena Pemancar Radio / KBE Broadcast 92,5 MHZ			Elektronik	2011	02.07.03.08.04	1 Unit		B			Bagian Umum
64	Generator	Diesel HD115 KVA Silent Cummins				2017	02.06.01.05.41	1 Unit	Rp 341.426.500	B			Pengadaan Diskominfo
65	Abba Rack 19 "	Closed Rack 20U depth 1150 MM				2017	02.06.01.04.02	1 Unit	Rp 11.200.000	B			Pengadaan Diskominfo
66	KVM					2017	02.06.03.01.05	1 Unit	Rp 14.750.000	B			Pengadaan Diskominfo
67	Stabilizer	Emmerich iDVM 10 kVA				2017	02.06.03.05.12	1 Unit	Rp 12.000.000	B			Pengadaan Diskominfo
68	Harddisk Eksternal	Seagate 2 TB				2017	02.06.03.05.14	2 Unit	Rp 3.156.000	B			Pengadaan Diskominfo
69	Memory Server	Lenovo 16 GB				2017	02.06.03.05.20	28 Unit	Rp 97.881.000	B			Pengadaan Diskominfo
70	Harddisk Server	Lenovo Server 1,2 TB				2017	02.06.03.03.12	4 Unit	Rp 38.397.000	B			Pengadaan Diskominfo
71	UPS	APC SRT 10KXLI				2017	02.06.03.05.11	1 Unit	Rp 64.721.000	B			Pengadaan Diskominfo
72	Komputer PC	Asus				2017	02.06.03.02.01	4 Unit	Rp 63.400.000	B			Pengadaan Diskominfo
73	Printer	EPSON L385				2017	02.06.03.05.03	5 Unit	Rp 15.494.800	B			Pengadaan Diskominfo
74	AC Split 2 PK	Merk Midea				2017	02.06.02.04.04	4 Unit	Rp 27.600.000	B			Pengadaan Diskominfo
75	Cooling System (Standing Ac) 2 PK	Merk Midea				2017	02.06.02.04.03	4 Unit	Rp 39.800.000	B			Pengadaan Diskominfo
76	PC 510-23ISH-FOCD0084ID	Lenovo All In One				2017	02.06.03.02.01	2 Unit	Rp 29.608.364	B			Pengadaan Diskominfo
77	Notebook ROG GL553VD-FY280T	Asus Gaming				2017	02.06.03.02.02	2 Unit	Rp 61.824.940	B			Pengadaan Diskominfo
78	Tower Triangel 45 Meter					2017	03.11.03.03.02	1 Set	Rp 44.333.000	B			Pengadaan Diskominfo
79	Televisi	Samsung 49 Inch				2017	02.06.02.06.03	1 Unit	Rp 12.000.000	B			Pengadaan Diskominfo
80	Televisi	LG 43 Inch				2017	02.06.02.06.03	1 Unit	Rp 5.000.000	B			Pengadaan Diskominfo

81	Televisi	Sharp 50 Inch				2017	02.06.02.06.03	4 Unit	Rp	37.766.300	B			Pengadaan Diskominfo
82	Logitech PTZ Pro Camera					2017	02.06.02.06.03	1 Unit	Rp	12.108.900	B			Pengadaan Diskominfo
83	Plank Nama Dinas Kominfo Kab Sergai					2017	02.06.01.05.06	1 Unit	Rp	4.700.000	B			Pengadaan Diskominfo
84	Website Kabupaten Sergai					2017	07.24.01.01.01		Rp	44.000.000				Pengadaan Diskominfo
85	Website Dinas Kominfo					2017	07.24.01.01.01		Rp	44.000.000				Pengadaan Diskominfo
86	UPS C 3000 VA LCD 230V	APC SMC3000 Smart UPS C 3000 VA LCD 230 V				2017	02.06.03.05.11	2 Unit	Rp	25.500.000	B			Pengadaan Diskominfo
87	Lenovo System X3650M5 (Dual Xeon, 128 GB, (.8TB)					2017	02.06.03.01.01	2 Unit	Rp	335.793.000	B			Pengadaan Diskominfo
88	IBM Storwize V3700					2017	02.06.03.01.01	1 Unit	Rp	152.438.000	B			Pengadaan Diskominfo
89	CCTV					2017	02.10.05.01.04	1 Set	Rp	14.500.000	B			Pengadaan Diskominfo
90	Matrox Multi Monitor (4 Monitor)					2017	02.06.03.02.05	1 Unit	Rp	21.000.000	B			Pengadaan Diskominfo
91	Braket TV					2017	02.06.02.06.50	4 Set	Rp	7.200.000	B			Pengadaan Diskominfo
92	Mic Audio Confrence	Merk Kretz Wireless + 2 Receiver				2017	02.06.02.06.17	6 Unit	Rp	20.400.000	B			Pengadaan Diskominfo
93	Stand Monitor Teleconference	Merk Kenzo 32" s/d 60"				2017	02.06.02.06.50	1 Unit	Rp	2.800.000	B			Pengadaan Diskominfo
94	Sound System					2017	02.06.02.06.08	1 Set	Rp	3.500.000	B			Pengadaan Diskominfo
95	Racun Api	Servvo 3 kg				2017	02.06.02.07.16	1 Unit	Rp	3.800.000	B			Pengadaan Diskominfo
96	Rak Server					2017	02.06.01.04.02	1 Unit	Rp	29.000.000	B			Pengadaan Diskominfo
97	Tower Triangel 35 Meter					2017	03.11.03.03.02	3 Unit	Rp	102.441.000	B			Pengadaan Diskominfo
98	Tower Triangel 25 Meter					2017	03.11.03.03.02	2 Unit	Rp	58.694.000	B			Pengadaan Diskominfo
99	Rak UPS					2017	02.06.01.04.02	1 Unit	Rp	9.700.000	B			Pengadaan Diskominfo
100	Laptop	Asus				2017	02.06.03.02.02	3 Unit	Rp	35.550.000	B			Pengadaan Diskominfo

101	Printer	Canon Pixma Mp287				2017	02.06.03.04.08	2 Unit	Rp	3.400.000	B			Pengadaan Diskominfo
102	Harddisk Eksternal	Seagate 2 TB				2017	02.06.03.05.14	2 Unit	Rp	3.800.000	B			Pengadaan Diskominfo
103	PC All In One	Lenovo AIO 52OS-23IKU				2017	02.06.03.02.01	1 Unit	Rp	14.150.000	B			Pengadaan Diskominfo
104	Scanner	Kodak ScanMate (1190)				2017	02.06.03.04.10	1 Unit	Rp	16.172.310	B			Pengadaan Diskominfo
105	Firewall					2017	02.06.03.06.06	1 Unit	Rp	68.750.000	B			Pengadaan Diskominfo
106	VMWare dan Windows Server					2017	07.24.01.01.01	1 Unit	Rp	287.725.000	B			Pengadaan Diskominfo
107	Modem Server	simbox RS-322 dengan 8x modul				2017	02.06.03.06.04	1 Unit	Rp	4.500.000	B			Pengadaan Diskominfo
108	Lensa Kamera	Canon EF 70-300 MM				2017	02.07.01.02.63	1 Unit	Rp	11.800.000	B			Pengadaan Diskominfo
109	Kamera Digital	Canon EOS1200D 18 MP				2017	02.07.01.02.03	1 Unit	Rp	6.800.000	B			Pengadaan Diskominfo
110	Kamera Digital Canon	Canon EOS1200D 24,2 MP				2017	02.07.01.02.03	1 Unit	Rp	11.900.000	B			Pengadaan Diskominfo
111	Kursi Putar	Chairman EC-900				2017	02.06.02.01.30	8 Unit	Rp	22.800.000	B			Pengadaan Diskominfo
112	Kursi Susun	Futra FTR-416				2017	02.06.02.01.31	12 Unit	Rp	10.800.000	B			Pengadaan Diskominfo
113	Tower Triangel 35 Meter					2018		3 Unit	Rp	102.441.000	B			Pengadaan Diskominfo
114	Tower Triangel 25 Meter					2018		2 Unit	Rp	58.694.000	B			Pengadaan Diskominfo
115	Handphone Tablet A 8" Samsung				Elektronik	2018		11 Unit	Rp	47.300.000	B			Pengadaan Diskominfo
116	Handphone Tablet 9.7 " Samsung				Elektronik	2018		1 Unit	Rp	10.900.000	B			Pengadaan Diskominfo
117	Keyboard Tablet					2018		1 Unit	Rp	2.900.000	B			Pengadaan Diskominfo
118	Lemari Besi 2 pintu Informa				Besi	2018		5 Unit	Rp	19.750.000	B			Pengadaan Diskominfo

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai

Kinerja pelayanan pada periode waktu sebelumnya merupakan kinerja pelayanan dengan nomenklatur masih berupa Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat dijelaskan dalam Tabel 2.1 Sesuai tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan beberapa kegiatan dan pelayanan sebagai bentuk kinerjanya dengan target dan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Massa	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	100%
2	Persentase Penyebaran Informasi Melalui Pertunjukkan, Publikasi, Pameran, Penerbitan dan Dialog Publik	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	100%
3	Persentase peningkatan kualitas SDM di Bidang Jurnalistik, Informasi dan Komunikasi Publik	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	100%
4	Persentase Interkoneksi antar OPD dan Sekolah	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Persentase Koneksi Wifi/Hotspot area Publik dan Koneksi CCTV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	Persentase aplikasi layanan Publik dan atau tata kelola Pemerintah yang terintegrasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Tabel 2.1
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	Persentase Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Massa	NA	NA	NA	NA	1.257.125.000	NA	NA	NA	NA	1.241.777.940	100%	100%
2	Persentase Penyebaran Informasi Melalui Pertunjukkan, Publikasi, Pameran, Penerbitan dan Dialog Publik	NA	NA	NA	NA	978.620.000	NA	NA	NA	NA	963.090.200	100%	100%
3	Persentase peningkatan kualitas SDM di Bidang Jurnalistik, Informasi dan Komunikasi Publik	NA	NA	NA	NA	379.500.000	NA	NA	NA	NA	367.142.545	100%	100%
4	Persentase Interkoneksi antar OPD dan Sekolah	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Persentase Koneksi Wifi/Hotspot area Publik dan Koneksi CCTV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	Persentase aplikasi layanan Publik dan atau tata kelola Pemerintah yang terintegrasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai

Pelayanan yang diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai secara umum dikatakan sudah memenuhi harapan masyarakat. Namun, seiring dengan perubahan masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks. Hal ini tentunya berimplikasi pada perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin canggih. Kemajuan tersebut seyogianya harus mampu direspon oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Namun, berbagai permasalahan dan kendala kerap dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan responsif. Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyelaraskan kemampuan / kapasitas yang dimilikinya sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Kemampuan itu tentunya harus berorientasi pada pelayanan informasi yang memuaskan dengan terus berupaya merespon keinginan dan harapan publik dengan menghadirkan program dan kegiatan yang relevan, efektif dan adaptif. Hal ini bertujuan agar tuntutan masyarakat mendapatkan pelayanan informasi yang cepat, murah dan akuntabel dengan memperhatikan dan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Ada beberapa tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai dalam upaya pengembangan pelayanan OPD, di antaranya :

- a. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek baru dalam dinamika pembangunan daerah di Kabupaten Serdang Bedagai yang mengarah ke daya saing.
- b. Pemerataan akses data dan informasi di berbagai sektor belum maksimal, baik dalam lingkup OPD, khususnya dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance).

- c. Pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan dan pengembangan TIK masih rendah, khususnya dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat.
- d. Sikap proaktif masyarakat terhadap pengembangan dan pemberdayaan TIK belum optimal.

Selain tantangan yang ada, terdapat juga peluang bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai dalam upaya pengembangan pelayanan informasi, seperti :

- a. Menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai sebagai pusat data (Data Center) dalam pengelolaan Teknologi Informasi di Kabupaten Serdang Bedagai melalui Network Operating System (NOC) dan sekaligus diharapkan sebagai konsultan perencanaan di bidang Komunikasi dan Informatika bagi seluruh OPD.
- b. Memanfaatkan jaringan komunikasi yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai modal utama dalam percepatan arus pertukaran dan diseminasi informasi antar OPD, seperti Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), Akses Internet dan Intranet.
- c. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan TIK mulai berkembang yang diharapkan dapat mendongkrak daya saing perekonomian di Provinsi Sumatera Utara pada umumnya dan di Kabupaten Serdang Bedagai pada khususnya.
- d. Investasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi.

Upaya dalam merealisasikan harapan dan peluang tersebut tidaklah semudah membalikkan kedua telapak tangan. Dibutuhkan kemampuan SDM yang handal dan kompeten di bidang Komunikasi dan Informatika. Selain itu, dukungan ketersediaan prasarana dan sarana fasilitas pendukung sangat dibutuhkan, antara lain gedung/kantor yang representatif, peralatan teknologi telematika, baik yang digunakan untuk penunjang aktifitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan LAN, WAN dan pemanfaatan Intranet dan Internet.

Untuk itu perlu dilakukan upaya pengembangan secara bertahap dan terencana, khususnya pengembangan konten Sistem Aplikasi OPD dalam satu Network Operating Center (NOC) guna peningkatan pelayanan publik. Jaringan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pejabat struktural, fungsional dan staf dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai dan masyarakat serta stakeholder untuk mengakses data dan informasi dari pusat data di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai melalui komputer secara intranet maupun internet di ruangan masing-masing baik untuk mencari informasi maupun menyebarluaskan informasi yang dimilikinya. Dengan demikian, diharapkan semua pihak, khususnya aparatur menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan pokok dalam menunjang tugas aparatur di segala bidang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai merencanakan optimalisasi pembangunan, pengelolaan dan pengembangan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan pemberdayaan masyarakat tetap menjaga dan mempertimbangkan dari aspek prioritas pembangunan daerah, menyeluruh, merata, seimbang dan tetap menjaga kondusivitas keberagaman di Kabupaten Serdang Bedagai.

Upaya tersebut dilaksanakan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima yang dicapai melalui program dan kegiatan yang relevan berdasarkan visi dan misi Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana yang diuraikan dalam lampiran Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.

Adapun kondisi yang diinginkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2021 adalah :

1. Menjadikan local government (pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai) sebagai pengelola dan koordinator jaringan telematika dan pusat database daerah dimana

- semua lembaga/institusi Pemerintah, swasta dan masyarakat dapat interkoneksi dalam satu Network Operating Center (NOC).
2. Adanya pengembangan prasarana dan sarana fasilitas publik bidang telematika yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga percepatan budaya informasi dapat berjalan signifikan.
 3. Peningkatan kualitas SDM dan sosialisasi IT bidang Komunikasi dan Informatika dengan sasaran aparatur Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, swasta, dan masyarakat serta komunitas di Kabupaten Serdang Bedagai.
 4. Adanya pembinaan dan pengaturan penggunaan prasarana dan sarana telematika pada OPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai.
 5. Adanya penyuluhan dan pembinaan penyelenggara telekomunikasi secara berkesinambungan.
 6. Pengembangan Infrastruktur telematika sampai tingkat Kecamatan sehingga penjangkauan data dapat dilakukan secara online dalam waktu relatif cepat dan efisien.
 7. Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa dalam rangka meningkatkan potensi daerah.
 8. Adanya pengembangan informasi dan komunikasi melalui kemitraan media massa.
 9. Adanya pembinaan dan pengembangan Media Tradisional di seluruh Kecamatan se Kabupaten Serdang Bedagai secara berkesinambungan untuk memantapkan diseminasi informasi kepada masyarakat.
 10. Adanya pembinaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai lumbung informasi bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai di Kecamatan yang berbasis IT.
 11. Pengembangan konten website Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang meliputi Aplikasi Sistem Informasi OPD, baik internet maupun intranet.
 12. Pengembangan implementasi e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

13. Adanya regulasi berupa Peraturan Bupati yang memberi kepastian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Teknologi Informatika dan didalamnya terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) seperti mengenai tata cara infrastruktur di bangun, prosedur aplikasi dibangun untuk kemudian digunakan sebagai pengelolaan data online, termasuk juga perencanaan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi di Kabupaten Serdang Bedagai.

B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Serdang Bedagai dengan tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan di bidang Komunikasi dan Informatika serta kehumasan berkomitmen untuk melakukan perubahan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik serta tata kelola pemerintahan berbasis e-government yang unggul, inovatif dan berkelanjutan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Organisasi Perangkat Daerah juga diberi kewenangan dalam hal :

- a. Melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. Melaksanakan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Dalam menjalankan kewenangan tersebut Dinas Komunikasi dan Informaaiika Kabupaten Serdang Bedagai masih menemui beberapa permasalahan dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi tersebut.

Adapun permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain adalah :

1. Kurangnya SDM ASN yang mempunyai kompetensi dan sertifikasi di bidang TIK
2. Infrastruktur Jaringan TIK belum terkoneksi sampai ke semua Puskesmas, UPT Dinas dan Sekolah-sekolah se-Kabupaten Serdang Bedagai (sarana dan Prasarana infrastruktur masih kurang)
3. Perangkat TIK yang membutuhkan Pemeliharaan dan pengawasan (Monitoring)

4. Belum terintegrasinya Aplikasi-aplikasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai
5. Belum adanya Pelayanan satu atap berbasis Aplikasi (Smart City) di Kabupaten Serdang Bedagai
6. Belum adanya fasilitas internet gratis di ruang publik
7. Terbatasnya sarana pembelajaran TIK bagi ASN dan Masyarakat
8. Terbatasnya sarana dan Prasarana Komunikasi penunjang operasional Pemerintah
9. Kurangnya Bimtek dan Sosialisasi kepada ASN dan masyarakat tentang perkembangan TIK terutama yang diterapkan di Kab. Serdang Bedagai
10. Software/ Aplikasi tertentu harus Update dan berbayar
11. Belum terstandarisasinya Infrastruktur dan Data center Kab. Serdang Bedagai
12. Kurangnya Komitmen semua kepala OPD dalam melaksanakan Pemerintahan yang bersih berbasis Aplikasi.
13. Kurang tersebar luasnya informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara merata di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
14. Penggunaan dan pengembangan media lain yang potensial dalam penyebarluasan informasi
15. Belum memadainya SDM di bidang komunikasi dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
16. Perlu dikembangkannya media tradisional dan kelompok informasi masyarakat untuk penyebarluasan informasi pembangunan sehingga dapat mencegah tersebarnya informasi yang tidak benar (Hoax)
17. Memperluas implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan sampai ke tingkat Desa
18. Pemutakhiran data dan monitoring menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai



19. Pendataan media massa (cetak, elektronik), media online, media sosial di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
20. Pengelolaan isu dan opini publik yang tersebar di media

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam bidang Komunikasi dan Informatika adalah faktor internal dan eksternal Dinas Kominfo.

Adapun faktor internal yang mempengaruhi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai antara lain :

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai baru terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Jumlah aparat yang masih terbatas dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
- c. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
- d. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
- e. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
- f. Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik
- g. Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat
- h. Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik
- i. Pengembangan infrastruktur TIK
- j. Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai adalah :

- a. Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat
- b. Lembaga maupun institusi pendidikan di Serdang Bedagai yang bergerak di bidang TIK
- c. Terbatasnya kewenangan daerah dalam penyelenggaraan jasa Pos dan Telekomunikasi

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No .	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Informasi dan Komunikasi Pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan	Informasi pembangunan masih belum tersampaikan kepada masyarakat secara merata	Kegiatan, program kerja dan proses pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan masih belum terinformasikan dengan optimal kepada masyarakat, khususnya program kerja semua OPD
			Sosialisasi pembangunan masih terbatas pada kegiatan pemerintahan yang bersifat seremoni dan dihadiri kepala daerah
			Kurangnya kesadaran OPD untuk mensosialisasikan layanan, program kerja, dan capaian kinerja kepada masyarakat ditambah ketiadaan sarana informasi yang dimiliki OPD masing-masing
		Strategi Komunikasi Pembangunan belum terlaksanan dengan optimal sebagai sarana sosialisasi berbagai kebijakan pemerintah	Media komunikasi pembangunan yang dimiliki masih sangat terbatas khususnya media komunikasi milik pemerintah daerah
			Diperlukan media-media baru yang memenuhi ruang kebutuhan informasi masyarakat serta relevan dengan perkembangan zaman
			Diperlukan SDM yang ahli dalam mengolah pesan-pesan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini khususnya pesan-pesan digital seperti infografis maupun videografis.



			<p>Perlu dikembangkan media-media komunikasi alternatif serta berbasis kearifan local seperti wayang, ludruk, dan pertunjukan rakyat lainnya</p> <p>Keterbatasan kapasitas dan kuantitas SDM pengelola Komunikasi Publik</p>
2.	Keterbukaan Informasi Publik	Komitmen seluruh OPD untuk menyiapkan dan menyajikan informasi yang akurat kepada masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel	<p>Belum optimalnya implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 di semua OPD</p> <p>Rendahnya kesadaran OPD dalam menyediakan informasi publik dalam rangka keterbukaan informasi public</p> <p>Rendahnya kesadaran untuk melaksanakan pelayanan informasi publik oleh OPD dalam rangka keterbukaan informasi publik</p>
3.	Isu-Isu yang berkembang di masyarakat serta pemberitaan hoax yang tersebar di masyarakat	Berkembang informasi yang tidak benar terkait pembangunan, pemerintah dan kemasyarakatan tanpa dapat dicegah	<p>Tidak memiliki kontrol atau pengawasan atas informasi yang berkembang di masyarakat</p> <p>Tidak adanya strategi khusus dalam memantau dan mengatasi isu-isu yang berkembang di masyarakat</p>
4.	Kurangnya SDM ASN yang mumpuni di bidang IT	Kurangnya SDM/ Staff ASN di Kominfo ataupun OPD lain, sehingga membutuhkan Tenaga Ahli dari Non ASN	<ul style="list-style-type: none"> - SDM yang mumpuni sedikit yang maujadi ASN - ASN kurang minat belajar lebih Fokus ke IT karena gaji/ penghasilan sama saja dengan yang tidak AHLI
5.	Infrastruktur Jaringan TIK belum terkoneksi kesemua instansi pemerintah daerah	Puskesmas, UPT dan Sekolah belum terkoneksi Jaringan TIK	<ul style="list-style-type: none"> - Jarak yang jauh dari Kabupaten/ Kecamatan - Belum ada anggaran
6.	Tidak adanya Sarana dan Prasarana Pendukung Pemeliharaan Jaringan TIK	Pemeliharaan Jaringan TIK di OPD-OPD tidak bias cepat dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada kendaraan Dinas untuk melakukan perjalanan - Tidak adanya peralatan Jaringan yang lengkap.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bupati Serdang Bedagai mempunyai visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 adalah “MENJADIKAN

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KABUPATEN YANG UNGGUL, INOVATIF DAN BERKELANJUTAN”

Makna dalam visi tersebut adalah :

Menjadikan adalah upaya yang dilakukan dalam membentuk sesuatu yang diharapkan atau dicita-citakan.

Kabupaten Serdang Bedagai adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.

Unggul adalah kemampuan mengelola sumber daya lokal yang lebih efektif dan efisien, bekerja keras, rajin, mampu, sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas daya saing daerah sehingga menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki nilai tambah dari daerah lainnya.

Inovatif adalah memanfaatkan setiap peluang guna mendorong kemandirian masyarakat dalam mewujudkan hal-hal terbaru dalam pelaksanaan proses pembangunan yang dapat meningkatkan daya saing produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berkelanjutan adalah mendorong produktivitas dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat saat ini dan yang akan datang, sehingga dapat tercipta pemerataan pembangunan serta perlindungan terhadap masyarakat yang marginal.

Guna mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

Misi Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkembangkan kehidupan berbudaya dan bermartabat.

Misi Kedua, meningkatkan investasi dan daya saing daerah melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan penciptaan energi terbarukan.

Misi Ketiga, mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Misi Keempat, memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing.

Misi Kelima, mendorong pemberdayaan dan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD lima tahun mendatang maka didapatkan sejumlah rumusan isu strategis, sebagaimana yang tersajikan dalam tabel III.1

Tabel III.1
Rumusan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1.	-	Penerapan Fungsi GPR (Government Public Relations)	Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK	Komitmen pimpinan dalam pengembangan TIK
2.	-	Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat	Sarana dan prasarana Komunikasi penunjang Operasional Pemerintah	Kewenangan dalam menangani TIK, Informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi
3.	-	Sistem pengamanan data dan Jaringan TIK (Firewall, fortigate, colocation, ISO)	Penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli
4.	-	Jaminan keamanan sistem TIK	Kemampuan Integrasi sistem	Komposisi PNS dan tenaga OS

			elayanan publik	
5.	-	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Pengembangan Infrastruktur TIK	Distribusi Infrastruktur Jaringan
6.	-	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Distribusi sistem aplikasi dalam menerapkan e-government	-
7.	-	-	Pengelolaann Website Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi	-
8.	-	-	Lembaga maupun institusi Pendidikan di Serdang Bedagai yang bergerak di bidang TIK	-
9.	-	-	Distribusi sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	-
10.	-	-	Kapasitas sarana dan prasarana komunikasi internal penunjang operasional pemerintah	-

Isu-isu yang teridentifikasi pada tabel diatas saling mempengaruhi satu sama lain. Salah satunya adalah isu strategis tentang partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK tentang bagaimana mensosialisasikan layanan publik yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat agar mereka mau memanfaatkannya, diperlukan pengelolaan komunikasi dan informasi kepada khalayak yang berkaitan dengan Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan Fungsi GPR (Government Public Relations). Selain bersifat peluang, isu strategis juga dapat menjadi ancaman bila tidak diantisipasi terutama jika potensi ancaman tersebut berasal dari permasalahan internal. Salah satunya adalah permasalahan masih kurangnya jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK. Hal ini dapat diatasi dengan memanfaatkan tenaga ahli TIK dari dalam maupun luar Serdang Bedagai.

B A B IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai merumuskan tujuan dan indikator tujuan sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Komunikasi dan Informasi yang Berbasis Teknologi.

- Persentase pelayanan publik yang berbasis teknologi

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai merumuskan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut:

1) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik

- Persentase Penyebaran Informasi Pembangunan melalui media massa;
- Persentase penyebaran informasi melalui pertunjukkan, pameran, penerbitan dan dialog publik;
- Persentase peningkatan kualitas SDM di bidang Jurnalistik, Informasi dan Komunikasi Publik.

2) Berkembangnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis e-Government

- Persentase Interkoneksi antar OPD dan sekolah;
- Persentase koneksi wifi/hotspot area publik dan koneksi CCTV;
- Persentase aplikasi layanan publik dan atau tata kelola Pemerintah yang terintegrasi.

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Konidi Kinerja Awal Priode 2015	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun ke				Target Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Tahun ke-				Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
					2016		2017		Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Komunikasi dan Informasi yang Berbasis Teknologi	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik	Persentase Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Massa	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penyebaran Informasi melalui Pertunjukkan, Publikasi, Pameran, Penerbitan dan Dialog Publik	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase peningkatan Kualitas SDM di Bidang Jurnalistik, Informasi dan Komunikasi Publik	NA	NA	NA	20%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
		Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Persentase Interkoneksi antar SKPD dan sekolah	NA	NA	NA	40%	0%	70%	90%	100%	100%	100%
			Persentase Koneksi Wifi/Hotspot area Publik dan koneksi CCTV	NA	NA	NA	0	0%	50%	70%	100%	100%	100%
			Persentase aplikasi layanan Publik dan atau tata kelola pemerintah yang terintegrasi	NA	NA	NA	40%	0%	70%	90%	100%	100%	100%



B A B V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara atau pola untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif serta lebih bersifat grand design, yang dirancang untuk merespon kondisi, prospek dan isu strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam perencanaan stratejik, yaitu merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumberdaya, kondisi lingkungan yang dihadapi.

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi instansi pemerintah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang disusun diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah yang diperkirakan akan timbul pada waktu mendatang.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyebaran informasi pembangunan lewat berbagai media baik cetak, elektronik dan Online.
2. Meningkatkan penyebaran informasi pembangunan lewat saluran non media massa seperti pameran, talkshow off air (dialog pembangunan), pertunjukkan rakyat, buku dan video selang pandang maupun melalui Kelompok Informasi Masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas SDM Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Serdang Bedagai
4. Melakukan pendataan lembaga penyiaran di Kabupaten Serdang Bedagai
5. Melaksanakan layanan informasi bagi masyarakat melalui PPID di setiap OPD
6. Menyediakan Infrastruktur Jaringan ke Semua OPD, UPT, Puskesmas dan Sekolah
7. Menyediakan perangkat WiFi/Hotspot serta CCTV beserta perangkat Pendukung lainnya di area publik

8. Melakukan pengintegrasian sistem e-Government guna memudahkan Monitoring keamanan dan pengawasan.

Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang sesuai. Meskipun jumlah kebijakan yang akan disusun berbeda, akan tetapi kebijakan minimal yang akan dikembangkan adalah meliputi kebijakan publik, kebijakan teknis, kebijakan alokasi sumberdaya, kebijakan dibidang personalia (sumberdaya), kebijakan di bidang keuangan dan kebijakan pelayanan masyarakat. Adapun kebijakan yang akan dikerjakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai untuk menjalankan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

Strategi 1 :

Meningkatkan penyebaran informasi pembangunan lewat berbagai media baik cetak, elektronik dan Online, akan ditempuh dengan kebijakan:

1. Memperbanyak jumlah publisitas pemberitaan pembangunan melalui media massa.
2. Melakukan koordinasi dengan OPD untuk melakukan dialog-dialog pembangunan lewat talkshow di media elektronik daerah (Radio Sergai FM)
3. Menjalin kerjasama dengan media massa dalam hal publikasi Kabupaten Serdang Bedagai

Strategi 2 : Meningkatkan penyebaran informasi pembangunan lewat saluran non media massa seperti pameran, talkshow off air (dialog pembangunan), pertunjukkan rakyat, buku dan video selang pandang maupun melalui Kelompok Informasi Masyarakat, akan ditempuh dengan kebijakan:

1. Menyiapkan materi informasi untuk bahan pameran berupa flyer, leaflet (brosur) dan dokumentasi photo kegiatan
2. Melaksanakan sosialisasi pembangunan melalui media tradisional pertunjukkan rakyat pada acara-acara berskala Kabupaten dengan berkoordinasi dengan OPD terkait.

3. Melakukan layanan informasi Internal melalui Bulletin Serdang Bedagai yang berisi seputar kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
4. Menginformasikan profil dan potensi Kabupaten Serdang Bedagai melalui buku dan video selang pandang.
5. Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat mulai dari tingkat Kecamatan dan sampai ke Desa.
6. Melakukan pembinaan kepada Kelompok informasi Masyarakat yang ada di Kecamatan maupun di Desa.
7. Melaksanakan dialog pembangunan dengan tema tertentu dengan menghadirkan stakeholder dan Kelompok Masyarakat yang terkait.

Strategi 3 : Meningkatkan kualitas SDM Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Serdang Bedagai, akan ditempuh dengan kebijakan:

1. Melaksanakan studi banding ke daerah lain terkait kompetensi SDM dan layanan informasi yang dilakukan di daerah lain.
2. Mengikuti pelatihan dan bimtek untuk meningkatkan kemampuan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang bedagai.
3. Melaksanakan pelatihan Jurnalistik bagi wartawan unit Pemkab Serdang Bedagai dan bagi masyarakat serta kalangan pelajar (citizen journalism)
4. Mengikuti kegiatan Temu bakohumas Nasional

Strategi 4 : Melakukan Pendataan lembaga penyiaran di Kabupaten Serdang Bedagai, akan ditempuh dengan kebijakan :

1. Melakukan pendataan terhadap seluruh lembaga penyiaran yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Melakukan koordinasi dengan Balai Monitoring Siaran Radio Kementrian Komunikasi dan Informatika.

Strategi 5 : Melaksanakan Layanan Informasi bagi Masyarakat melalui PPID di setiap OPD, akan ditempuh dengan kebijakan :

1. Melakukan Pelatihan dan Sosialisasi bagi PPID Pelaksana dan Admin aplikasi PPID disemua OPD.
2. Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Melakukan Koordinasi dengan Tim untuk melakukan penyelesaian sengketa Informasi Publik.
4. Membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh OPD untuk bersinergi melaksanakan pelayanan informasi public yang unggul di Kabupaten Serdang Bedagai.

Strategi 6 : Menyediakan Infrastruktur Jaringan ke Semua OPD, UPT, Puskesmas dan Sekolah akan ditempuh dengan kebijakan:

1. Melaksanakan pengembangan masterplan rencana Induk e-Government 5 tahun kedepan.
2. Melakukan Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan dan perangkat keras).
3. Membangun prasarana dan sarana infrastruktur jaringan ke semua OPD, UPT, Puskesmas dan Sekolah.
4. Melakukan perawatan jaringan antar OPD

Strategi 7 : Menyediakan perangkat WiFi/Hotspot serta CCTV beserta perangkat Pendukung lainnya di area publik, akan ditempuh dengan kebijakan:

1. Membangun Command Center Kabupaten Serdang Bedagai
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Memperbanyak ruang publik yang terfasilitasi wifi/hotspot serta CCTV

Strategi 8 : Melakukan pengintegrasian sistem e-Government guna memudahkan Monitoring keamanan dan pengawasan, akan ditempuh dengan kebijakan:

1. Melakukan pemetaan layanan publik
2. Menyusun SOP Pengembangan Aplikasi Pelayanan publik administratif
3. Melakukan pengintegrasian aplikasi antar OPD yang berbasis web
4. Membangun aplikasi-aplikasi baru dalam mendukung pelaksanaan e-government di Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan bagi Tenaga IT dari masing-masing OPD.
Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi dan arah

kebijakan, maka akan ditampilkan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi	MENJADIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KABUPATEN YANG UNGGUL, INOVATIF DAN BERKELANJUTAN			
Misi I	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkembangkan kehidupan berbudaya dan bermartabat 1			
Tujuan 2	Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan good governance			
Sasaran 3	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Bidang Komunikasi dan Informasi yang berbasis Teknologi	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Komunikasi dan Informasi Publik	Meningkatkan penyebaran informasi pembangunan lewat berbagai media baik cetak, elektronik dan Online.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbanyak jumlah publisitas pemberitaan pembangunan melalui media massa. 2. Melakukan koordinasi dengan OPD untuk melakukan dialog-dialog pembangunan lewat talkshow di media elektronik daerah (Radio Sergai FM) 3. Menjalin kerjasama dengan media massa dalam hal publikasi Kabupaten Serdang Bedagai
			Meningkatkan penyebaran informasi pembangunan lewat saluran non media massa seperti pameran, talkshow off air (dialog pembangunan), pertunjukkan rakyat, buku dan video selayang pandang maupun melalui Kelompok Informasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan materi informasi untuk bahan pameran berupa flyer, leaflet (brosur) dan dokumentasi photo kegiatan 2. Melaksanakan sosialisasi pembangunan melalui media tradisional pertunjukkan rakyat pada acara-acara berskala Kabupaten dengan berkoordinasi dengan OPD terkait. 3. Melakukan layanan informasi Internal melalui Bulletin Serdang Bedagai yang berisi seputar kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. 4. Menginformasikan profil dan potensi Kabupaten Serdang Bedagai melalui buku dan video selayang pandang.



		<ol style="list-style-type: none"> 5. Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat mulai dari tingkat Kecamatan dan sampai ke Desa. 6. Melakukan pembinaan kepada Kelompok informasi Masyarakat yang ada di Kecamatan maupun di Desa. 7. Melaksanakan dialog pembangunan dengan tema tertentu dengan menghadirkan stakeholder dan Kelompok Masyarakat yang terkait.
	Meningkatkan kualitas SDM Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Serdang Bedagai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan studi banding ke daerah lain terkait kompetensi SDM dan layanan informasi yang dilakukan di daerah lain. 2. Mengikuti pelatihan dan bimtek untuk meningkatkan kemampuan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang bedagai. 3. Melaksanakan pelatihan Jurnalistik bagi wartawan unit Pemkab Serdang Bedagai dan bagi masyarakat serta kalangan pelajar (citizen journalism) 4. Mengikuti kegiatan Temu bakohumas Nasional
	Melakukan Pendataan lembaga penyiaran di Kabupaten Serdang Bedagai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan terhadap seluruh lembaga penyiaran yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. 2. Melakukan koordinasi dengan Balai Monitoring Siaran Radio Kementrian Komunikasi dan Informatika.
	Melaksanakan Layanan Informasi bagi Masyarakat melalui PPID di setiap OPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pelatihan dan Sosialisasi bagi PPID Pelaksana dan Admin aplikasi PPID disemua OPD. 2. Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. 3. Melakukan Koordinasi dengan Tim untuk melakukan penyelesaian sengketa Informasi Publik. 4. Membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh OPD untuk bersinergi melaksanakan pelayanan informasi public yang unggul di Kabupaten Serdang Bedagai.
	Berkembangnya tata kelola Pemerintahan berbasis e-Government	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengembangan masterplan rencana Induk e-Government 5 tahun kedepan. 2. Melakukan Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan dan perangkat keras). 3. Membangun prasarana dan sarana infrastruktur jaringan ke semua OPD, UPT, Puskesmas dan Sekolah. 4. Melakukan perawatan jaringan antar OPD

			Menyediakan perangkat WiFi/Hotspot serta CCTV beserta perangkat Pendukung lainnya di area publik	<ol style="list-style-type: none">1. Membangun Command Center Kabupaten Serdang Bedagai2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik3. Memperbanyak ruang publik yang terfasilitasi wifi/hotspot serta CCTV
			Melakukan pengintegrasian sistem e-Government guna memudahkan Monitoring keamanan dan pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pemetaan layanan publik2. Menyusun SOP Pengembangan Aplikasi Pelayanan publik administratif3. Melakukan pengintegrasian aplikasi antar OPD yang berbasis web4. Membangun aplikasi-aplikasi baru dalam mendukung pelaksanaan e-government di Kabupaten Serdang Bedagai.5. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan bagi Tenaga IT dari masing-masing OPD.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021.

Masa-masa awal RPJMD Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai urusan Komunikasi dan Informatika masih di jalankan oleh Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai karena Dinas Komunikasi dan Informatika belum terbentuk. Pada Tahun 2016 telah menetapkan program dan indikator milik Kabupaten yang diemban oleh masing-masing SKPD. Untuk Bagian Hubungan Masyarakat menjalankan 5 program.

Selanjutnya untuk rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut.

1. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Program ini memiliki indikator kinerja Persentase Informasi Pembangunan yang Terpublikasi. Program ini terdiri dari 7 kegiatan, antara lain :

1. Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah
2. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3. Jasa Pelayanan Perizinan
4. Silaturahmi dengan Insan Pers
5. Studi Banding Jurnalistik
6. Intelijen Media Manajemen
7. Talkshow Pembangunan

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini memiliki indikator kinerja Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Prima Administrasi Perkantoran. Program ini terdiri dari 7 kegiatan, antara lain :

1. Penyediaan jasa kebersihan kantor
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4. Penyediaan makan dan minum tamu
5. Penyediaan makan dan minum rapat
6. Rapat-rapat koordinasi keluar daerah
7. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program ini memiliki indikator kinerja Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang terpublikasi. Program ini terdiri dari 7 kegiatan, antara lain :

1. Penyebaran Informasi melalui penerbitan, publikasi dan pameran
2. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
3. Pengembangan Lembaga Komunikasi dan Informasi Masyarakat
4. Pembuatan Pakaian kerja Lapangan
5. Dialog Interaktif Pembangunan
6. Operasional PPID
7. Operasional Media Center
8. Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Lembaga Penyiaran
9. Monitoring dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

4. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Program ini memiliki indikator kinerja Persentase Peningkatan Penyebaran Informasi Potensi Kabupaten Serdang Bedagai. Program ini terdiri dari 2 kegiatan, antara lain :

1. Updating Selayang Pandang Kabupaten Serdang Bedagai
2. Penerbitan Buku Selayang Pandang

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini memiliki indikator kinerja Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik. Program ini terdiri dari 6 kegiatan, antara lain :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor
3. Pengadaan Meubelair
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

6. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Program ini memiliki indikator kinerja Persentase Peningkatan SDM Bidang Kominfo yang memiliki kompetensi. Program ini terdiri dari 6 kegiatan, antara lain :

1. Lomba menulis esai, fotografi dan video visual
2. Temu Bakohumas dan Komunitas Informasi Tingkat Nasional
3. Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi
4. Uji Kompetensi Wartawan
5. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Media Tradisional
6. Lomba Kelompok Informasi Masyarakat dan Media Tradisional Tingkat Kabupaten Serdang Bedagai

7. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program ini memiliki indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Program ini terdiri dari 13 kegiatan, antara lain :

1. Pembangunan Prasarana dan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi
2. Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi
3. Smart Region

4. Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data
5. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik
6. Penerapan ISO
7. Penyusunan Rencana Induk e-Government Kabupaten Serdang Bedagai
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
9. Command Center
10. Sosialisasi dan Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
11. Studi Kelayakan Pengembangan Jaringan W-LAN
12. Penyediaan jasa pemeliharaan website Serdang Bedagai
13. Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik berbasis website
14. Pengembangan Aplikasi
15. Penyediaan Data Informasi-informasi dan statistik

Rencana program / kegiatan dan pendanaan termuat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal (2015)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
					Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Komunikasi dan Informasi yang Berbasis Teknologi	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik	Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase informasi pembangunan yang terpublikasi	100%	100%	1.265.220	100%	2.147.000	100%	2.250.000	100%	2.450.000	100%	2.575.000	100%	2.700.000	100%	13.387.220
		1. Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Persentase Informasi pembangunan yang tersebarluaskan melalui media massa	100	100	854.712	100	987.000	100	1.100.000	100	1.300.000	100	1.400.000	100	1.500.000	100	7.141.712
		2. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	95 media	75 media	295.000	60 media	275.000	60 media	275.000	60 media	275.000	60 media	275.000	60 media	275.000	60 media	1.670.000
		3. Jasa Pelayanan Perizinan	Jumlah Izin Radio Siaran Sergai FM	2 Ijin	2 Ijin	2.208	2 Ijin	5.000	2 Ijin	5.000	2 Ijin	5.000	2 Ijin	5.000	2 Ijin	5.000	2 Ijin	27.208
		4. Silaturahmi dengan Insan Pers	Jumlah temu pers yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	113.300	2 kali	130.000	2 kali	120.000	2 kali	120.000	2 kali	120.000	2 kali	120.000	14 kali	723.300
		5. Studi Banding Jurnalistik	Jumlah peserta yang mengikuti studi banding jurnalistik	0	0	-	120 org	500.000	120 org	500.000	120 org	500.000	120 org	500.000	120 org	500.000	600 orang	2.500.000
		6. Intelijen Media Manajemen	Persentase Analisa Pemberitaan di Media massa	0	0	-	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	220.000	100%	240.000	100%	1.060.000
		7. Talkshow Pembangunan	Jumlah Kegiatan Talkshow yang dilaksanakan	0	0	-	100 kali	50.000	100 kali	50.000	100 kali	50.000	100 kali	55.000	100 kali	60.000	600 kali	265.000
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Prima Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	25.000	100%	550.000	100%	904.000	100%	1.025.000	100%	1.075.000	100%	1.075.000	100	4.654.000
		1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan yang tersedia	0	0	-	0	-	2 Org	56.000	2 Org	65.000	2 Org	65.000	2 Org	65.000	2 Org	251.000
		2. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Alat Tulis Kantor yang terpenuhi	0	0	-	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	750.000
		3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tercetak	0	0	-	0	-	1 Paket	200.000	1 Paket	300.000	1 Paket	350.000	1 Paket	350.000	4 Paket	1.200.000
		4. Penyediaan makan dan minum Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minum tamu	0	0	-	0	-	12 bln	24.000	12 bln	24.000	12 bln	24.000	12 bln	24.000	48 bln	96.000
		5. Penyediaan Makan dan Minum Rapat	Jumlah penyediaan makan dan minum rapat	0	0	-	0	-	12 bln	24.000	12 bln	36.000	12 bln	36.000	12 bln	36.000	48 bln	132.000
		6. Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	0	0	-	20 kali	300.000	20 kali	300.000	20 kali	300.000	20 kali	300.000	20 kali	300.000	100 kali	1.500.000
		7. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan dinas kedalam daerah	0	25 kali	25.000	100 kali	100.000	100 kali	150.000	100 kali	150.000	100 kali	150.000	100 kali	150.000	525 kali	725.000
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Publikasi melalui petunjuk dan Media Cetak	100%	100%	1.177.547	100%	1.896.620	100%	2.028.620	100%	2.183.620	100%	2.278.620	100%	2.398.620	100%	11.963.647
		1. Penyebaran informasi melalui penerbitan, publikasi dan pameran	Persentase penyebaran informasi melalui penerbitan, publikasi dan pameran	100%	100%	1.089.597	100%	998.620	100%	1.028.620	100%	1.028.620	100%	1.028.620	100%	1.028.620	100%	6.202.697
		2. Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah pertunjukkan rakyat yang dilaksanakan	15 Kali	3 kali	87.950	4 kali	153.000	6 kali	150.000	10 kali	250.000	15 kali	325.000	17 kali	375.000	55 kali	1.340.950



		3. Pengembangan Lembaga Komunikasi dan Informasi Masyarakat	Jumlah kelompok Informasi Masyarakat yang terbina	0	0	-	4 kelompok	40.000	6 kelompok	60.000	8 kelompok	80.000	10 kelompok	100.000	17 kelompok	170.000	17 kelompok	450.000
		4. Pembuatan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	-	0	-	35 Stel	35.000	70 Stel	70.000	70 Stel	70.000	70 Stel	70.000	245 Stel	245.000
		5. Dialog Interaktif Pembangunan	Jumlah Dialog Interaktif yang dilaksanakan	0	0	-	2 kali	250.000	2 kali	250.000	2 kali	250.000	2 kali	250.000	2 kali	250.000	10 kali	1.250.000
		6. Operasional PPID	Persentase permintaan dan Sengketa informasi yang terselesaikan	0%	0%	-	70%	325.000	75%	325.000	80%	325.000	90%	325.000	100%	325.000	100%	1.625.000
		7. Operasional Media Center	Jumlah Media Center Kabupaten Serdang Bedagai	0	0	-	1 MC	90.000	1 MC	120.000	1 MC	120.000	1 MC	120.000	1 MC	120.000	1 MC	570.000
		8. Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Lembaga Penyiaran	Persentase lembaga penyiaran yang terdata	0%	0%	-	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	100.000
		9. Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Lembaga Penyiaran	Pendataan dan Pengawasan menara Telekomunikasi di Kabupaten Serdang	0%	0%	-	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	100.000
		10. Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Lembaga Penyiaran	Pendataan dan Pengawasan menara Telekomunikasi di Kabupaten Serdang Bedagai	0%	0%	-	0%	-	30%	20.000	65%	20.000	70%	20.000	75%	20.000	75%	80.000
		Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Peningkatan Penyebaran Informasi Potensi Kabupaten	0%	0%	0	0%	395.000	100%	395.000	0%	395.000	0%	395.000	0%	395.000	100%	1.975.000
		1. Updating Selayang Pandang Kabupaten Serdang Bedagai	Jumlah Selayang Pandang Kabupaten Serdang Bedagai yang terupdate	0	0	-	1 Video	320.000	1 Video	320.000	1 Video	320.000	1 Video	320.000	1 Video	320.000	1 Video	1.600.000
		2. Penerbitan Buku Selayang Pandang	Jumlah buku Selayang Pandang yang dicetak	0	0	-	500 exp	75.000	500 exp	75.000	500 exp	75.000	500 exp	75.000	500 exp	75.000	2500 exp	375.000
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	178.285	90%	1.153.880	95%	2.483.760	95%	1.931.520	95%	1.931.520	95%	1.931.520	95%	9.610.485
		1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	0	0	-	0	-	6 unit	900.000	4 Unit	350.000	4 Unit	350.000	4 Unit	350.000	18 Unit	1.950.000
		2. Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan	5 Jenis	5 jenis	163.285	10 jenis	750.000	10 jenis	914.000	10 jenis	900.000	10 jenis	900.000	10 jenis	900.000	55 Jenis	4.527.285
		3. Pengadaan Meubelair	Jumlah mebeleur Kantor yang didakan'	0%	0%	-	2 Jenis	120.000	3 Jenis	180.000	3 Jenis	150.000	3 Jenis	150.000	3 Jenis	150.000	14 Jenis	750.000
		4. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Oeprasional	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara	0%	0%	-	100%	53.880	100%	89.760	100%	131.520	100%	131.520	100%	131.520	100%	538.200
		5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	Persentase peralatan gedung/kantor yang terpelihara	100%	100%	15.000	100%	30.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	845.000
		6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara.	0%	0	-	1 Paket	200.000	1 Paket	200.000	1 Paket	200.000	1 Paket	200.000	1 Paket	200.000	5 paket	1.000.000
		Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase Peningkatan SDM Bidang Kominfo yang memiliki kompetensi	84%	78%	430.000	100%	1.070.000	100%	1.270.000	100%	1.290.000	100%	1.340.000	100%	1.440.000	100%	6.840.000
		1. Lomba Menulis Essai, Fotografi dan Video Visual	Jumlah lomba yang dilaksanakan	1 lomba	1 lomba	80.000	3 lomba	120.000	3 lomba	150.000	3 lomba	150.000	3 lomba	150.000	3 lomba	150.000	16 lomba	800.000
		2. Temu Bakohumas dan Komunitas Informasi Tingkat Nasional	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan	0	0	-	5 org	50.000	10 org	150.000	10 org	150.000	10 org	150.000	10 org	150.000	45 orang	650.000



		3. Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase wartawan yang mengikuti pelatihan	0	80%	350.000	80%	450.000	85%	450.000	90%	450.000	95%	500.000	100%	600.000	100%	2.800.000
		4. Uji Kompetensi Wartawan	Persentase wartawan yang lulus uji kompetensi	0	0%	-	20%	300.000	40%	300.000	60%	300.000	80%	300.000	100%	300.000	100%	1.500.000
		5. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Media Tradisional	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang mengikuti Bimtek	0	0	-	5 Kelompok	50.000	10 Kelompok	100.000	17 Kelompok	120.000	17 Kelompok	120.000	17 Kelompok	120.000	17 Kelompok	510.000
		6. Lomba Kelompok Informasi Masyarakat dan Media Tradisional Tingkat Kabupaten Serdang Bedagai	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang mengikuti perlombaan	0	0	-	5 Kelompok	100.000	10 Kelompok	120.000	17 Kelompok	120.000	17 Kelompok	120.000	17 Kelompok	120.000	17 Kelompok	580.000
		Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan melalui aplikasi IT	0%	0%	3.237.000	0%	4.040.000	60%	5.375.000	75%	21.475.000	90%	8.645.000	100%	8.645.000	100%	51.417.000
		1. Pembangunan Prasarana dan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	Persentase prasarana dan sarana jaringan yang terbangun	0%	40%	3.237.000	50%	400.000	80%	800.000	90%	1.000.000	100%	1.500.000	100%	1.500.000	100%	8.437.000
		2. Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	Persentase jaringan antar OPD yang terpelihara	0%	0%	-	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	500.000
		3. Smart Region	Jumlah Tenaga Ahli di Data Center	0	0	-	6 org	300.000	6 org	300.000	6 org	300.000	6 org	300.000	6 org	300.000	6 org	1.500.000
		4. Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	Persentase Sistem Informasi yang terintegrasi ke Pusat Data	0%	0%	-	50%	100.000	60%	120.000	80%	140.000	100%	160.000	100%	160.000	100%	680.000
		5. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Persentase Sistem Informasi Pelayanan Publik yang terpelihara	0%	0%	-	100%	260.000	100%	260.000	100%	260.000	100%	260.000	100%	260.000	100%	1.300.000
		6. Penerapan ISO	Jumlah sertifikasi ISO	0	0	-	0	-	0	-	1 Paket	450.000	1 Paket	450.000	1 Paket	450.000	1 Paket	1.350.000
		7. Penyusunan Rencana Induk E-Government Kabupaten Serdang Bedagai	Jumlah Buku/Dokumen Rencana Induk e-Government	0	0	-	0	-	0	-	1 Buku	350.000	0	-	0	-	1 Buku	350.000
		8. Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase OPD yang tersambung jaringan internet	0%	0%	-	50%	2.460.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	14.460.000
		9. Command Center	Jumlah Command Center yang terbangun	0	0	-	0	-	0	-	1 CC	15.000.000	1 CC	2.000.000	1 CC	2.000.000	1 CC	19.000.000
		10. Sosialisasi dan Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan	0	0	-	1 kali	80.000	1 kali	80.000	2 kali	160.000	2 kali	160.000	2 kali	160.000	8 kali	640.000
		11. Studi Kelayakan Pengembangan Jaringan W-LAN	Jumlah laporan hasil studi kelayakan pengembangan jaringan WLAN	0	0	-	1 Laporan	100.000	1 Laporan	100.000	1 Laporan	100.000	1 Laporan	100.000	1 Laporan	100.000	5 Laporan	500.000
		12. Penyediaan jasa pemeliharaan Website Serdang Bedagai	Jumlah website yang terpelihara	0	0	-	2 Web	240.000	2 Web	240.000	2 Web	240.000	2 Web	240.000	2 Web	240.000	2 Web	1.200.000
		13. Integrasi aplikasi pelayanan publik berbasis website	Jumlah aplikasi OPD yang terintegrasi berbasis web	0	0	-	0	-	1 Apl	75.000	3 Apl	75.000	3 Apl	75.000	3 Apl	75.000	10 Apl	300.000



		14. Pembangunan Aplikasi	Jumlah aplikasi baru yang terbangun	0	0		0	-	1 Apl	180.000	1 Apl	180.000	1 Apl	180.000	1 Apl	180.000	4 Apl	720.000
		15. Penyediaan Data Informasi-informasi dan statistik, serta terlaksananya WEB, KAB, OPD/Desa/Kelurahan	Terupdatanya WEB Kab, OPD/Desa/Kelurahan	0	0	-	0	-	1 Web	120.000	1 Web	120.000	1 Web	120.000	1 Web	120.000	4 Web	480.000
						6.313.052		11.252.500		14.706.380		30.750.140		18.240.140		18.585.140		99.847.352



B A B VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 2016-2021, Visi Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai untuk periode 2016-2021 adalah: “MENJADIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KABUPATEN YANG UNGGUL, INOVATIF DAN BERKELANJUTAN”

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut, ada 5 (lima) misi pembangunan daerah, salah satunya adalah Misi I yaitu

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkembangkan kehidupan berbudaya dan bermartabat.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Informasi dan Komunikasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam RPJMD untuk misi I point (2) yaitu penyelenggaraan good governance dan clean government dengan sasarannya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut diatas.

Sesuai dengan RPJMD 2016-2021, maka indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 7.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target dan Realisasi Capaian setiap tahun								Kondisi Kinerja Akhir Priode RPJMD
			2016		2017		2018	2019	2020	2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	Persentase Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Massa	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penyebaran Informasi Melalui Pertunjukkan, Publikasi, Pameran, Penerbitan dan Dialog Publik	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase peningkatan kualitas SDM di Bidang Jurnalistik, Informasi dan Komunikasi Publik	NA	NA	NA	20%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
4	Persentase Interkoneksi antar OPD dan Sekolah	NA	NA	NA	NA	NA	70%	90%	100%	100%	100%
5	Persentase Koneksi Wifi/Hotspot area Publik dan Koneksi CCTV	NA	NA	NA	NA	NA	50%	70%	100%	100%	100%
6	Persentase aplikasi layanan Publik dan atau tata kelola Pemerintah yang terintegrasi	NA	NA	NA	NA	NA	70%	90%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Renja setelah Renstra Perubahan berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan khususnya dalam urusan komunikasi dan informatika, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2021

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 s.d. 2021 mengacu dan berpedoman pada Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 ini.

2. Renja Dinas Tahun 2022

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 berpedoman dan mengacu pada Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021, Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021, Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2025 dan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025 serta Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2021-2025. Selain itu dapat juga mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023, Renstra K/L, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023, dan RPJMN Tahun 2020-2024. Renja Tahun 2022 harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2025. Selanjutnya, Renja dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Perubahan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program dan kegiatan, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kaidah pelaksanaan Perubahan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021, dan selanjutnya Perubahan Renstra menjadi dasar pedoman penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam hal pelaksanaan Perubahan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, Perubahan Renstra berpedoman dan mengikuti Perubahan RPJMD;
2. Perubahan Renstra selanjutnya dijabarkan dalam Renja. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berpedoman pada Perubahan Renstra.
3. Program/Kegiatan baru beserta indikator kinerja dan pagu indikatif diselaraskan dengan program/kegiatan pada Tahun 2016, 2017 dan 2018 beserta capaian indikator kinerja.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perubahan Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perubahan Renstra secara berkala;

5. Perubahan Renstra dapat berjalan manakala mendapat dukungan dari seluruh jajaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai target indikator yang telah ditetapkan dengan sebaik baiknya.

Sei Rampah,

2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



H. IKHSAN, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750512 199311 1 001